

Kapitalisme Pendidikan Di Indonesia: Sebuah Kritik Perspektif Ilmu Manajemen Pendidikan Islam

Eko Suncaka

Universitas Islam An Nur Lampung, Indonesia
ekosuncaka@an-nur.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini berusaha untuk mengkaji nilai-nilai kapitalisme dalam pendidikan di Indonesia baik di masa sejarah maupun perkembangannya, lalu dibandingkan dengan nilai-nilai ilmu manajemen pendidikan Islam sebagai Anti tesa dari ide pertama. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara kapitalisme pendidikan dan nilai-nilai Manajemen Pendidikan Islam. Hubungan ke duanya yaitu sama-sama berfokus pada suatu pelaksanaan pendidikan yang syarat akan suatu ilmu manajemen. Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif, dengan pendekatan pendalaman teori (Grounded Theory), dengan teknik kajian pustaka (Library Research) lalu menganalisa isinya (Content analisis). Hasil penelitian ini adalah bahwa kapitalisme terhadap segala aspek kehidupan termasuk pendidikan. Pendidikan menjadi liberal, kapitalistik, dan sekuler yang hanya mengandalkan logika. Pendidikan semacam ini ditujukan hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial semata, dengan mengabaikan arti penting dan tujuan dasar pendidikan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk menghilangkannya. Yang pertama adalah bahwa manajemen pendidikan nasional harus terbuka, terjangkau dan tidak kaku: sementara yang kedua adalah bahwa tujuan pendidikan harus diarahkan pada orientasi mental siswa. Dalam sudut pandang ilmu Manajemen Pendidikan Islam Pendidikan kapitalisme tidak sesuai dengan konsep-konsepnya, yaitu Fleksibel, efektif dan Efisien, Terbuka, Kooperatif dan Partisipatif.

Kata Kunci: Kapitalisme Pendidikan; Manajemen Pendidikan Islam; Logika Pendidikan; Pendidikan Nasional

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk berbudaya, kebudayaan yang telah dilahirkan oleh manusia sangat mempengaruhi karakter dan sepak terjang manusia, baik secara individu maupun kolektif. Menurut Meville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski sebagaimana dikutip oleh Soeharjono Soekanto, bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Kebudayaan merupakan sesuatu yang bersifat *super-organic*, karena kebudayaan yang berturun-temurun dari generasi ke generasi tetap hidup terus, walaupun orang-orang yang menjadi anggota masyarakat senantiasa silih-berganti disebabkan karena kematian dan kelahiran (Soekanto, 2002).

Sejak manusia lahir sudah mempunyai naluri untuk hidup berkawan, sehingga manusia disebut *social animal*. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai naluri yang disebut *gregariousness*. Pada hubungan antara manusia dengan sesamanya, tampaknya yang paling penting adalah reaksi yang timbul akibat adanya interaksi. Reaksi-reaksi itu mengakibatkan bertambah luasnya sikap dan tindakan seseorang. Misalnya, apabila seseorang menyanyi, maka ia memerlukan reaksi yang mungkin bersifat positif (pujian) ataukah bersifat negatif (celaan), reaksi itulah yang mendorong seseorang untuk memperbaiki dan semakin menyempurnakan tindakannya (nyanyiannya) pada masa-masa yang akan datang. Hal ini disebabkan karena manusia mempunyai dua hasrat dalam dirinya, yaitu pertama keinginan untuk menjadi satu dengan sesamanya atau manusia lain yang ada di sekelilingnya. Kedua keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alam sekelilingnya. Untuk dapat menghadapi dan menyesuaikan diri dengan kedua lingkungan tersebut, yakni lingkungan sosial dan lingkungan alam, manusia mempergunakan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, selain itu manusia juga berusaha keras menyerasikan diri dengan kedua lingkungannya tersebut untuk merefleksikan diri sebagai salah satu bagian dari masyarakatnya (Soekanto, 2002).

Dalam pandangan Islam, budaya biasa disebut *tsaqafat*, *hadarat* dan *madaniyah* (peradaban). Budaya atau peradaban dalam Islam mengandung dua makna yaitu; Pertama, lawan kata dari primitif dan buas. Peradaban merupakan fase tertinggi dari fase-fase perkembangan manusia. Kedua, sekumpulan keistimewaan masyarakat, keagamaan, moralitas, teknik, keilmuan, seni, yang terbesar dalam masyarakat tertentu, seperti peradaban India, Yunani, dan Arab. Budaya biasa juga diartikan sebagai sejumlah fenomena kemajuan ilmu pengetahuan, seni, moralitas yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu kelompok masyarakat yang memiliki kemiripan. Budaya itu beraneka

ragam yang dapat diklompokkan dalam beberapa istilah yaitu; budaya kuno, budaya modern, budaya Barat, budaya Timur (Az-Zuhaili, 2002).

Salah satu budaya yang lahir dari masyarakat Barat pada akhir abad pertengahan yang masih sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat modern dewasa ini adalah paham kapitalis, atau yang lebih akrab disebut kapitalisme. Kapitalisme muncul pada abad keenam belas dan ketujuh belas. Perkembangan mentalitas kapitalis menurut Max Weber, sebagaimana dikutip oleh Pritjof Capra, adalah terkait erat dengan konsep panggilan dalam agama yang muncul untuk merefleksikan akan kesadaran terhadap adanya kewajiban moral untuk memenuhi tugas seseorang dalam kehidupan dunia. Konsep panggilan dunia ini mengungkapkan perilaku religius ke dalam dunia sekuler. Konsep tersebut bahkan ditekankan lebih kuat oleh sekte-sekte Puritan, yang memandang aktivitas dunia dan imbalan material yang berasal dari perilaku rajin sebagai sebuah suatu tanda takdir Ilahi. Dengan demikian, muncullah etos kerja protestan yang terkenal itu, di mana kerja keras mengingkari diri sendiri dan keberhasilan dunia disamakan dengan kebaikan. Sebaliknya orang-orang Puritan membenci semuanya itu kecuali konsumsi yang paling hemat, dan akibatnya pengumpulan kekayaan bisa diterima selama digabung dengan kerja rajin (Capra, 2000).

Kapitalisme, sebagai sebuah budaya sekaligus sebagai ideologi masyarakat Barat, sejak lahirnya sampai saat sekarang ini telah memberi pengaruh yang cukup besar terhadap segala segi kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal ini segi pendidikan. Sistem pendidikan yang diamanatkan oleh kapitalisme adalah pendidikan liberal kapitalistik yang bersifat sekuler dan mengandalkan kekuatan rasio semata. Kemajuan ilmu pengetahuan modern, menurut paham kaum liberalis sekuler, adalah dilatarbelakangi oleh kekuatan metodologi dan eksperimen, sejarah merupakan hal yang urgen untuk dipelajari, tetapi keseluruhan proses dalam bidang ilmu pengetahuan dilepaskan dari nilai-nilai transenden Tuhan (Nanji, 2003). Padahal paradigma pendidikan Islam sesungguhnya adalah bersifat fundamental, yaitu penanaman nilai-nilai cinta pada bangsa tidak serta merta selalu berfokus pada hasil prestasi dan pekerjaan seseorang yang menjadi salah satu akar sebab munculnya kapitalisme dalam dunia pendidikan di Indonesia (Arrohmata, 2019). Untuk itu melalui penelitian ini penulis mengkaji tentang pelaksanaan Kapitalisme Pendidikan di Indonesia dan kritiknya dari perpektif ilmu manajemen pendidikan (MPI).

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kapitalisme dan Perkembangannya

Kapitalisme muncul sebagai antitesa terhadap sekularisme dan materialisme, yang telah menjadi idologi masyarakat Barat pada saat itu. Sekularisme dan materialisme sendiri lahir dari emperisme dan individualisme. Sekularisme dan materialisme inilah menyebabkan tingginya produktifitas barang-barang dan kemewahan duniawi, lalu kemudian melahirkan mentalitas abad industri yang manipulatif. Kebiasaan dan aktivitas baru itu mengakibatkan terciptanya institusi sosial dan politik baru dan membangkitkan pengajaran akademik baru yang membuat teori tentang seperangkat aktivitas ekonomi khusus, produksi, pertukaran, distribusi, peminjaman uang yang tiba-tiba muncul menonjol dalam relief yang lajani. Inilah yang mengakibatkan lahirnya kapitalisme (Capra, 2000).

Kapitalisme tampil sebagai kelompok sosial-ekonomi yang bersandarkan kepada ajaran agama Katolik untuk melawan dan menetralisir paham sekularisme dan materialisme yang cenderung melepaskan diri dari ikatan agama. Dalam praktik etos kerja dan pemenuhan kebutuhan duniawi menurut paham kapitalisme dianggap sebagai bagian dari pengabdian terhadap Tuhan, bahkan dalam pandangannya, aktivitas duniawi dan imbalan dari aktivitas tersebut merupakan "takdir Ilahi". Menurut teori Weber, nilai-nilai dan alasan religius ini memberi dorongan dan energi emosional bagi kaum materialisme, dan faktor ini sangat penting bagi kemunculan dan perkembangan pesat kapitalisme (Capra, 2000).

Walaupun kapitalisme pada akhirnya masuk ke dalam berbagai sendi kemasyarakatan seperti; pendidikan, hukum, industri, seni, dan politik, tetapi ia tidak dapat dilepaskan dari perhitungan rasional kapital ekonomi. Perhitungan rasional ekonomi tersebut meliputi; Pertama, pemilikan semua sarana fisik untuk produksi, tanah, bahan-bahan mentah, mesin, peralatan dan seterusnya usaha industri swasta otonom merupakan hak milik yang dapat dijual oleh pemiliknya, hanyalah ketentaraan yang tidak dapat dimiliki secara perorangan. Kedua, akuntansi melibatkan kebebasan pasar, yaitu tidak ada peembatasan-pembatasan irrasional atas perdagangan, pembatasan-pembatasan seperti itu mungkin menyangkut halangan-halangan status, bila suatu cara hidup atau konsumsi tertentu ditetapkan bagi satu kelas sosial. seperti ketika warga kota tidak diijinkan memiliki suatu pertanahan atau seorang ksatria atau petani tidak diijinkan melakukan suatu pekerjaan yang berbeda. Dalam situasi seperti itu tidak ada pasar pekerja bebas atau pasar komoditas bebas. Ketiga, akuntansi kapitalistik membutuhkan teknologi rasional. Keempat, adalah menyangkut hukum yang dapat diperhitungkan. Organisasi industri kapitalistik harus didasarkan pada peradilan dan administrasi yang dapat diperhitungkan. Kelima, adalah pekerja bebas. Pekerjaan untuk rakyat harus tersedia, baik bagi pekerja yang legal maupun pekerja yang menjual jasa tenaganya karena dipaksa oleh kemiskinan misalnya. Dan keenam, adalah adanya komersialisasi kehidupan ekonomi, yang dimaksud adalah penggunaan secara umum sarana-sarana komersial yang berbentuk hak-hak saham dalam suatu perusahaan (Andreski, 1989).

Pada akhirnya, sistem kapitalisme ala puritanisme menyerah juga, yaitu kapitalisme yang mengedepankan nilai-nilai agama dalam beretoskerja dan mencari kesejahteraan duniawi, kemudian berubah menjadi sekuler. Yang sangat berjasa dalam perubahan ini adalah Max Weber, konsep kapitalis ala Max Weber inilah yang menjadi besar hingga sekarang ini, di Eropa khususnya. Dalam pandangan Weber, kapitalisme dapat dibagi dua yaitu; kapitalisme rasional dan kapitalisme irrasional. Kapitalisme rasional adalah kapitalisme yang mengembangkan metode-metode dan kuantitas produksi, kapitalisrne bentuk pertama ini memproduksi materi atau kekayaan Sementara kapitalisme irrasional adalah bentuk kapitalisme politik, yang dianggap mengeduk kekayaan materi yang sudah ada, dan tidak ditanam sebagai usaha untuk menghasilkan peningkatan kekayaan (Andreski, 1989). Dalam penetrasinya di dunia Barat, kapitalisme bukannya berjalan mulus tanpa tantangan, tapi ia dikritisi oleh ekonom ternama sejak awal perkembangannya, seperti Max Weber, kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh lain seperti Kenneth Boulding, Erich Fromm, dan Barbara Werd. Dalam perkembangan selanjutnya, kapitalisme juga dikritik oleh kaum feminis, karena kapitalisme dianggap sangat berpihak kepada kepentingan laki-laki (patriarkhal). Hubungan antara nilai-nilai patriarkhal adalah ditunjukkan oleh Frederich Angels pada abad ke setnbilan belas, ia menganggap bahwa tekanan tcrhadap wanita berakar pada sisten ekonotni kapitalis, tetapi ia juga mengakui bahwa sistem patriarkhal tersebut sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu, Inenurut estimasinya, bahwa sistem patiarkhal tersebut akan berakhir dengan runtuohnya kapitalisme (Capra, 2000).

Kapitalisme masuk ke Indonesia pada saat penjajahan Belanda, tidak lama setelah kaum liberal di negeri Belanda memperoleh kemenangan di parlemen, kemudian disusul dengan diadakannya liberalisasi di Hindia Belanda (daerah jajahannya), terutama di Indonesia. Upaya-upaya tersebut antara lain berupa: (1) Penghapusan tanam paksa secara berangsur-angsur sejak tahun 1865 yang telah berlangsung mulai dari tahun 1830. (2) Diterimanya undang-undang agraria (hak atas tanah) pada tahun 1870, akibatnya: Para kapitalis Belanda diperbolehkan menanam modalnya di Indonesia dengan menyewa tanah-tanah yang belum pernah ditanami oleh orang-orang Indonesia selatna 75 tahun. Dengan demikian tinggallah perkebunan-perkebunan besar yang dibuka oleh para kapitalis Belanda, dan menjaga hak milik bangsa Indonesia, tanah Indonesia tidak boleh dijual kepada bangsa asing, dan hanya dapat dijual kepada bangsa Indonesia sendiri. Perubahan tanam paksa menjadi perusahaan perkebunan tanam paksa menjadi perkebunan perusahaan swasta, walaupun perubahan tersebut tidak membawaa kepada perubahan nasib bangsa Indonesia, karena para kapitalis Belanda memaksa pekerja dengan upah yang serendah-rendahnya yaitu 6 sen per hari (Mudyaharju, 2008).

C. METODE

Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif karena data yang diteliti bukan data angka, penelitian ini menggunakan strategi *Grounded Theory*, yaitu mendalami suatu topik untuk dikaji secara mendalam dengan teori disiplin ilmu, teknik yang digunakan adalah Studi pustaka (*Library Research*) yaitu kajian berdasarkan data literatur non lapangan, dengan teknik analisis isi (*Content Analysis*) yaitu proses prosedur yang ketat dan sistematis untuk menganalisa, menguji, dan mengklarifikasi data.

D. HASIL PEMBAHASAN

Kapitalisme Pendidikan di Indonesia

Di antara Ciri liberalisasi ilmu pengetahuan adalah: (1) munculnya paham positivisme sekuler terhadap ilmu pengetahuan ilmiah, aktivitas teknologi, peradaban material, hukum, dan etika pragmatik individu; (2) Ilmu pengetahuan ilmiah dibagi ke dalam disiplin Yang spesialis, mendalam, teknis dan terpisah; (3) Ilmu pengetahuan positif mendeskreditkan atau mengeliminasi fungsi agama-agama dalam masyarakat ilmiah (Mudyahardjo, 2008).

Di Indonesia, pendidikan liberal kapitalistik juga terjadi. Awala dimulai dari sekolah penjajah, dalam hal ini bangsa Belanda, tetapi penetrasi sekolah-sekolah liberal Hindia Belanda tersebut tidak dapat menghapuskan pendidikan Islam sama sekali, pesantren-pesantren di berbagai daerah masih berdiri tegak dan masih diminati Oleh masyarakat Indonesia. Pemerintah Belanda bukan berarti tinggal diam dan membiarkan berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut, tetapi mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghapuskannya secara bertahap melalui intervensi terhadap sosio-ekonomi umat Islam. Pusat-pusat aktivitas-aktivitas perdagangan muslim pada daerah-daerah dirusak dan dibekukan, tetapi gangguan ekonomi yang dilakukan Belanda terhadap aset-aset umat Islam tiakl menyurutkan tensi lembaga-lembaga pendidikan Islam, bahkan perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam semakin meningkat sampai ke daerah-daerah pedalaman dan pelosok, tempat jaringan agraris dari para ulama berbasis pesantren dan tarekat sufi, terutama di Jawa yang telah mengambil alih peranan dalam pengajaran Islam (Nanji, 2003).

Belanda berusaha merusak pendidikan Islam dengan menyerang ststem perekonomiannya yang kuat, yaitu daerah-daerah pesisir dan pelabuhan yang merupakan penggerak roda utama perekonomian produktif umat Islam melalui jalan perdagangan, dengan harapan bahwa apabila ekonominya lemah maka akan mempengaruhi dan melemahkan pendidikannya, inilah pikiran kapitalisme yang selalu memandang bahwa segala sesuatu akan berjalan bila didukung oleh kapital atau ekonomi yang mapan, tetapi pikiran tersebut tidak sepenuhnya benar bagi umat Islam, terutama yang hidup di zaman Belanda tersebut. Setelah upaya penghancuran sendi-sendi ekonomi masyarakat muslim dirasakan kurang memadai untuk mencegah lajunya pendidikan berbasis Islam di Indonesia, pemerintah Hindia

Belanda menggunakan power politik untuk menekannya dengan melalui pembuatan kebijakan atau aturan khusus bagi penyelenggaraan pendidikan Islam.

Kebijakan-kebijakan tersebut adalah Pada tahun 1882, pemerintah Hindia Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi pendidikan dan pelaksanaan Islam di masyarakat. Dari laporan-laporan badan inilah sehingga pada tahun 1905 pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan bahwa setiap orang yang melakukan pengajaran atau pengajian agama Islam, harus terlebih dahulu melapor kepada pemerintah Belanda. Pada tahun 1925, keluar lagi peraturan yang lebih ketat terhadap pendidikan agama Islam, yaitu tidak semua Kyai boleh memberikan pelajaran agama Islam, kecuali telah mendapat rekomendasi dari pemerintah Belanda. Pada tahun 1932, keluar lagi peraturan yang isinya adalah pemerintah Hindia Belanda berwenang untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak memiliki izin atau memberikan pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan Belanda. Selain itu, pemerintah Belanda juga menempuh usaha yang mematikan kegiatan-kegiatan umat Islam, seperti mempelajari ihwal pribumi dan agama Islam dengan ilmu khusus yang disebut *indologi* untuk mencari celah kelemahan Islam. Untuk itu diutuslah Prof. DR. Cristian Snouck Hurgronje, sarjana sastra untuk belajar tentang Islam di Leiden dan Starsbourg, kemudian melanjutkan studinya ke Mekkah selama enam bulan, dan namanya diganti menjadi Abdul Gaffar. Setelah kembali dari Mekkah ia dikirim untuk membantu menyelesaikan perlawanan santri di Aceh. Melalui kesempatan ini Snouck Hurgronje menyampaikan kepada pemerintah Hindia Belanda, agar mereka memperhatikan sikap netral terhadap semua agama di Indonesia menggunakan jalur pendidikan unluk mengatasi fanatisme Islam secara berevolusi, dan pemerintah Belanda diharapkan mewaspadai masuknya Pan Islamisme yang sedang berkembang di Timur Tengah, dengan jalan menghalangi masuknya buku-buku atau brosur lain ke wilayah Indonesia. dan mengawasi kontak langsung dan tidak langsung antara tokoh-tokoh Islam Indonesia dengan tokoh-tokoh luar (Nizar, 2009).

Pada masa penjajahan Belanda, sistem pendidikan liberal kapitalistik sulit untuk diterapkan kepada bangsa Indonesia, terutama pada sistem pendidikan Islam yang telah mengakar lebih dahulu dibandingkan dengan kedatangan bangsa penjajah Belanda tersebut. Kemudian orang-orang Belanda menarik simpatik masyarakat Indonesia, setiap kebijakan yang mereka buat selalu merugikan bangsa Indonesia, sehingga hal tersebut menjadi sumber kemarahan dan kebencian mereka terhadap pemerintah Belanda. Dengan demikian apa yang dilakukan dan diprogramkan oleh Belanda senantiasa dinilai negatif, termasuk sistem pendidikan yang mereka selenggarakan, baik yang diperuntukkan kepada orang-orang Belanda sendiri, maupun yang diperuntukkan kepada bangsa Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, barulah mulai terbuka untuk mengadopsi sistem pendidikan Barat, termasuk melanjutkan sistem pendidikan yang telah ditinggalkan oleh penjajah Belanda, walaupun tidak secara total diambil. Bahkan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti

pesantren dan madrasah ikut mengalami pergeseran seiring dengan semakin gencanya penetrasi modernisasi global.

Sejak pertengahan dekade 20-an, modernisasi pendidikan agama berlangsung demikian intens. Standarisasi sistem sekolah, pembakuan kurikulum, metode pembelajaran mengadopsi metode yang diterapkan oleh sekolah pemerintah, penerbitan buku-buku teks dilakukan oleh kaum modernis sendiri. Modernisasi pendidikan agama itu sesungguhnya sudah mewakili kecenderungan terhadap "sekularisasi", salah satu indikatornya adalah mata-mata pelajaran umum (sekuler) terus-menerus membengkak dalam komposisi kurikulum lembaga pendidikan Islam. Perubahan sistem pendidikan Islam itu, diikuti perubahan sistem ekonomi pendidikan dengan mengadopsi sistem kolonial Belanda yang kapitalis, sistem pendidikan agama lewat surau dan pondok pesantren yang memperoleh dana dari sedekah yang diberikan oleh masyarakat, kini berubah menjadi madrasah yang harus dibayar oleh keluarga siswa masing-masing dengan bayaran yang sama tanpa mempertimbangkan tingkat ekonomi keluarga setiap siswa. Perubahan mendasar lain adalah menyangkut kepemilikan lembaga pendidikan, jika pesantren atau surau itu adalah dimiliki pendiri dan anak cucunya secara turun temurun, maka madrasah adalah milik organisasi, yayasan atau pemerintah yang sudah ditentukan sistem menejemennya. (Azra, 1999).

Madrasah atau sekolah yang dikelola oleh pemerintah dan yayasan sudah menerapkan sistem pendidikan yang dikomersilkan, setiap siswa yang masuk di sekolah tersebut harus membayar uang sekolah, kemudian dananya dikelola oleh pihak penyelenggara sekolah, sebagian dari dana tersebut dimanfaatkan untuk pemeliharaan lembaga, dan sebagian yang lain digunakan untuk upah pengelola dan para guru. Longganya persyaratan untuk mendirikan yayasan oleh pemerintah, menyebabkan menjamurnya lembaga-lembaga pendidikan swasta yang komersil, baik sekolah yang berhaluan umum, maupun madrasah dan pesantren modern, bahkan sampai kepada tingkat perguruan tinggi. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut kadangkadang terlihat sepi dalam hari-hari belajarnya tetapi setiap tahun mengeluarkan ijazah dalam jumlah yang banyak. Kalau penyelenggara pendidikan swasta yang melakukan pungutan biaya sesuai dengan keinginan mereka dari para peserta didik, mungkin hal itu masih dapat dipandang wajar, karena lembaga itulah yang menjadi sumber dana primer untuk pembiayaan segala aspek yang menggerakkan roda pendidikannya, termasuk biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sekolah dan para guru. Tetapi kalau yang melakukannya adalah sekolah-sekolah di bawah naungan pemerintah, ini yang menjadi masalah yang serius. Dan hal ini menjadi kenyataan dalam dunia pendidikan di Indonesia dewasa ini, yaitu adanya kastaniasi pendidikan. Ironisnya adalah kastaniasi pendidikan tersebut di atas, diisyaratkan oleh UU SISDIKNAS Nomor. 20 Tahun 2003, tentang Pengelolaan Pendidikan, Pasal 50 ayat 3, yang berbunyi; Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua

jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional (Republik Indonesia, 2009). Akibatnya adalah melahirkan pendidikan yang mahal dan ekslusif.

Kritik Kapitalisme Perpektif Manajemen Pendidikan Islam

Kegelisahan dunia pendidikan di Indonesia dewasa ini, karena pendidikan yang diharapkan menjadi agen dalam usaha untuk mencerdaskan seluruh bangsa Indonesia, tetapi terkontaminasi oleh praktik-praktik pendidikan kapitalis, sehingga pendidikan yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menemukan solusi terhadap berbagai persoalan-persoalan sosial bangsa, tetapi justru pendidikan itu sendiri yang sering menjadi persoalan sosial yang sulit ditemukan solusinya, seperti persoalan biayanya, lingkungannya, sarana-prasarana, kurikulumnya, dan lain-lain. Kapitalisme pendidikan jelas bertentangan dengan konsep Ilmu Manajemen Pendidikan Islam yang mengandung nilai konsep fleksibel, efektif, effisien, terbuka, cooperative dan partisipatif berdasarkan dalil Al Qur'an.

Fleksibel adalah tidak kaku (lentur), sekolah atau madrasah meraih prestasi unggul justru karena fleksibilitas pengelolanya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pengelol lembaga pendidikan harus berani mengambil kebijakan atau memutuskan hal-hal yang berbeda dengan tuntutan/petunjuk formal dari atas, oleh karena itu untuk menghidupkan kreativitas para pengelola lembaga pendidikan maka perlu dikembangkan evaluasi yang tidak semata-mata berorientasi pada proses melainkan dapat dipahami pada produk dan hasil yang akan dicapai, jika pandangan ini dipahami, maka manajemen dalam hal ini kinerja manajer atau pemimpin pendidikan tidak hanya diukur dengan menggunakan telah terlaksana progam yang ada, tetapi lebih dari itu adalah sejauh mana pelaksanaan itu melahirkan produk-produk yang diinginkan oleh berbagai pihak (Suprayogo, 1994). Konsep fleksibel merupakan pencerminan sikap dari al Qur'am Surat al-Hajj ayat 78, yang artinya: "Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong".

Efektif dan Efisien, memiliki makna berbeda namun hampi sama, pekerjaan yang efektif ialah yang memberikan hasil seperti rencana, sedangkan pekerjaan yang efisien adalah pekerjaan yang megeluarkan biaya sesuai dengan rencana atau lebih rendah, yang dimaksud dengan biaya adalah uang, waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Kedua kata efektif dan efisien selalu dipakai bergandengan dalam manajemen karena manajemen yang efektif saja sangat mungkin terjadinya pemborosan, sedangkan manajemen yang efisien saja bisa berakibat tidak tercapainya tujuan atau rencana yang

telah ditetapkan (Sidarta, 1999). Ayat-ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan acuan kedua hal tersebut adalah Surat al-Kahfi ayat 103-104 (tentang efektif), yang artinya: "Katakanlah: "Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya".

Terbuka, Yang dimaksud dengan terbuka disini bukan saja terbuka dalam memberikan informasi yang benar tetapi juga mau memberi dan menerima saran/pendapat orang lain, terbuka kesempatan kepada semua pihak, terutama staff untuk mengembangkan diri sesuai dengan kemampuannya baik dalam jabatan maupun bidang lainnya Al-Qur'an telah memberikan landasan kepada kaum muslin untuk berlaku jujur dan adil yang mana menurut kami hal ini merupakan kunci keterbukaan, karena tidak dapat dilakukan keterbukaan apabila kedua unsur ini tidak terpadu (Sidarta, 1999). Ayat al-Qur'an yang menyuruh umat manusia untuk berlaku jujur dan adil yang keduanya merupakan kunci keterbukaan itu, ada dalam surat An Nisa ayat 58, yang artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

Cooperative dan partisipatif , Dalam melaksanakan tugasnya manajer pendidikan Islam harus *cooperative* dan partisipatif. Hal ini disebabkan. Ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa manajemen pendidikan Islam harus bersifat *cooperative* dan partisipatif hal ini disebabkan karena dalam kehidupan ini kita tidak bisa melepaskan diri dari beberapa limitasi (keterbatasan), pertama Limitasi *physic* (alam) misalnya untuk memenuhi kebutuhan makanan ia harus menanam dan ini sering dilakukan orang lain atau bersama orang lain, kedua Limitasi Psichologi (ilmu jiwa). Manusia akan menghargai dan menghormatinya, Ketiga Limitasi sociology. Manusia tidak akan dapat hidup tanpa orang lain, Keempat Limitasi biologis. Manusia secara biologis termasuk makhluk termasuk makhluk yang lemah sehingga untuk memperkuat dan mempertahankan dirinya manusia harus bekerjasama, saling memberi dan menerima bersatu dan mengadakan ikatan dengan manusia (Sibuan, 1989). Ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan cooperative dan partisipatif ini antara lain, surat al-Maidah ayat 2 sebagai berikut, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang *qalaa-id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhan mereka apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu

dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. Syi'ar Allah Ialah: segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji dan tempat-tempat mengerjakannya. Maksudnya antara lain Ialah: bulan Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muhamarram dan Rajab), tanah Haram (Mekah) dan Ihram., Maksudnya Ialah: dilarang melakukan perperangan di bulan-bulan itu.Ialah: binatang (unta, lembu, kambing, biri-biri) yang dibawa ke ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih ditanah Haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadat haji.Ialah: binatang had-ya yang diberi kalung, supaya diketahui orang bahwa binatang itu telah diperuntukkan untuk dibawa ke Ka'bah.Dimaksud dengan karunia Ialah: Keuntungan yang diberikan Allah dalam perniagaan. keridhoan dari Allah Ialah: pahala amalan haji”.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, mengenai kapitalisme dan pendidikan kapitalistik, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Kapitalisme muncul sebagai antitesa terhadap sekularisme dan materialisme, yang telah menjadi idologi masyarakat Barat pada saat itu. Sekularisme dan materialisme sendiri lahir dari emperisme dan individualisme. Sekularisme dan materialisme inilah menyebabkan tingginya produktifitas barang-barang dan kemewahan duniawi, lalu kemudian melahirkan mentalitas abad industri yang manipulatif. Kebiasaan dan aktivitas baru itu mengakibatkan terciptanya institusi sosial dan politik baru dan membangkitkan pengajaran akademik baru yang membuat teori tentang seperangkat aktivitas ekonomi khusus, produksi, pertukaran, distribusi, peminjaman uang yang tiba-tiba muncul menonjol dalam relief yang tajam. Inilah yang mengakibatkan lahirnya kapitalisme. Sistem kapitalisme ala puritanisme mengalami pergeseran menjadi sekuler. Kemudian mengalami perkembangan selanjutnya dengan terpecahnya menjadi dua kelompok yaitu; kapitalisme rasional dan kapitalisme irrasional. Kapitalisme rasional adalah kapitalisme yang mengembangkan metode-metode dan kuantitas produksi, kapitalisme bentuk pertama ini memproduksi materi atau kekayaan. Sementara kapitalisme irrasional adalah bentuk kapitalisme politik, yang dianggap mengeduk kekayaan materi yang sudah ada, dan bukannya ditanam sebagai usaha untuk menghasilkan peningkatan kekayaan. Sistem pendidikan yang berhaluan liberal kapitalistik adalah seluruh bentuk pengelolaan pendidikan yang dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan finansial belaka, yang tidak menghiraukan lagi pentingnya pendidikan bagi setiap anak. Sehingga sekolah-sekolah yang menolak seorang calon peserta didik karena tidak mampu membayar uang sekolah, maka sekolah-sekolah tersebut digolongkan sebagai sekolah kapitalis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alinda, S. (2007). *Pengantar Sosiolinguistik*. Bandung: Refika Aditama.
- Andreski, S. (1989). *Max Weber: Kapitalisme, Birokrasi, dan Agama*. Yogyakarta: PT. Tirta Wacana Yogyo.
- Arrohmatan. (2019). Religion Materials Deconstruction on Student Books of Senior High School in Indonesia. *Journal of Research in Islamic Education*, 51-60.
- Azra, A. (1999). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Az-Zuhaili, W. (2002). *Al Qur'an Menjawab Tantangan Zaman*. Jakarta: Mustaqim.
- Capra, P. (2000). *Titik Balik Peradaban*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Ellis, R. (2002). *The Study of Second Language Acquisition*. New York: Oxford University Press.
- Guntur, H., & Tarigan, D. (1988). *Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa*. Bandung: Angkasa.
- Hastuti, S. (1989). *Sekitar Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia*. Yogyakarta: Mitra Gama.
- Mudyahardjo, R. (2008). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Mudyaharju, R. (2008). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Murwati, R., Windarti, A., & Wiyono, T. P. (2016). *Tantri Basa Adhedhasar Pergub No. 19 taun 2014 Muatan Lokal Bahasa Daerah Provinsi Jawa Timur lan KTSP 2013*. Jawa Timur: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
- Nanji, A. (2003). *Peta Studi Islam: Orientalisme dan Arah Kajian Baru Kajian Islam di Barat*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Nizar, S. (2009). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Nurhayati, E., & Mulyani, S. (2006). *Linguistik Bahasa Jawa*. Yogyakarta: Bagaskara.
- Parera. (1993). *Leksikon Istilah Pembelajaran Bahasa*. Jakarta: Gramedia.
- Parera. (1997). *Linguistik Edukasional, Metodologi Pembelajaran Bahasa, Analisis Kontrasif antar Bahasa, Analisis Kesalahan Bahasa*. Jakarta: Erlangga.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Richards, J. C. (1973). *Error Analysis, Perspectives on Second Language Acquisition*. London: Longman.
- Roekhan. (1990). *Dimensi-dimensi dalam Belajar Bahasa Ke Dua*. Bandung: Sinar Baru.
- Sibuan, M. (1989). *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: CV. Haji Mas Gus.
- Sidarta, M. (1999). *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara.

- Soekanto, S. (2002). *Sosiolog: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada.
- Sudiana, N. (1990). *Analisis Kekhilafan dalam Belajar Bahasa Ke Dua dalam Dimensi-dimensi dalam Belajar Bahasa Kedua*. Bandung: Sinar Baru, .
- Suprayogo, I. (1994). *Revormulasi Visi Pendidikan Islam*. Kediri: STAIN Press.

